

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAMBI**



Skripsi Oleh :

Shabiyya Aqila

01021181621250

Ekonomi Pembangunan

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAMBI

Disusun oleh:

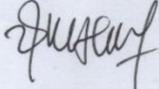
Nama : Shabiyya Aqila
NIM : 01021181621250
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

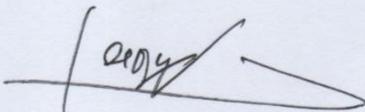
TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 26 Februari 2021


Ketua : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP : 197007162008012015

Tanggal : 19 februari 2021


Anggota : Mardalena, S.E., M. Si
NIP : 197804212014092004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAMBI

Disusun Oleh:

Nama : Shabiyya Aqila
NIM : 01021181621250
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 April 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

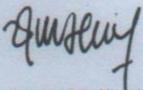
Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 23 April 2021

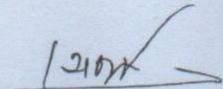
Ketua

Anggota

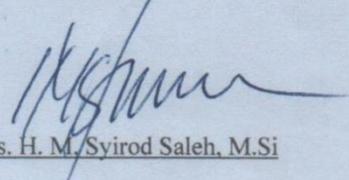
Anggota


Dr. Anna Yuliahita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015


Mardalena, S.E., M.Si

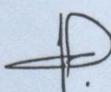
NIP. 197804212014092004


Drs. H. M. Syirod Saleh, M.Si

Indralaya, 23 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

ASLI
23-6-2021
JUR. EK PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shabiyya Aqila

NIM : 01021181621250

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Pembimbing :

Ketua : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Anggota : Mardalena, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 23 April 2021

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 30 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Shabiyya Aqila

NIM. 01021181621250

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Indralaya, 30 April 2021

Penulis,

Shabiyya Aqila

NIM. 01021181621250

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala yang dilewati. Adapun kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk saya sehingga saya bisa menghadapi rintangan sampai terselesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini untuk melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua saya yaitu Syahruli Suharno dan Jamiah serta kedua adik saya Shabiyya Fitria dan Shabiyya Atika, mereka orang yang paling hebat di dunia ini, orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang tak henti-hentinya untuk saya selama masa perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Mardalena, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. M. Syirod Saleh, M.Si selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya serta memberi semangat untuk saya dalam hal akademik selama masa perkuliahan.
7. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si.

8. Segenap dosen akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan yang selalu siap membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan kepada saya sehingga dapat menunjang penyelesaian skripsi ini.
9. Mbak Iin, Kak Deri, Kak Heru, Mbak Narti, dan Yuk Sumi selaku pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang sangat membantu saya untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keperluan lainnya dari awal hingga masa perskripsi saya.
10. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 Kampus Indralaya yang member warna pada awal masa perkuliahan hingga saat ini serta teman-teman konsentrasi keuangan daerah yang telah membersamai saya dalam beberapa semester ini.
11. Kekasih saya Muhammad Ardi Alfaridzi pria hebat yang tanpa henti selalu memberikan dukungan, semangat, serta bantuan kepada saya dalam hal apapun termasuk proses pembuatan skripsi ini. Nasihat dan saran yang diberikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi.
12. Semua teman saya yang sudah menemani, membantu, memberi dukungan, serta semangat untuk saya selama perkuliahan ini yaitu MC Squad (Astria, Maya, Jilan, Wawa, Hurry, Ria, Tahta, Wawan, Arul, Habibi, Niko, Fonso, Fieri, Hery, Refly, dan Adit), The Centes (Sandra, Ina, Putnov, dan Lifia), Idiot (Intan, Dita, Afifa, Rini, Calvin, dan Kak Odon), Bukda Squad (Aura, Ismi, Bima, Alfa, Septian, Odi, Heru, Jefri, dan Yoga), Ready Stock (Repita, Tiara, Gisti, Reve, Suep, dan Arif) serta teman-teman Sanggar Rumah Elok Palembang.
13. Teman-teman organisasi IMEPA (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan) yang telah menambah pengalaman dan wawasan untuk saya yang dapat membuat saya lebih baik lagi.

14. Teman-teman organisasi UKM Harmoni Universitas Sriwijaya yang telah menjadi rumah kedua bagi saya, keluarga yang baik serta nyaman yang telah memberikan banyak pengalaman dan wawasan bagi saya yaitu Pak Arfan, Ira, Repita, Tiara, Gisti, Reve, Suep, Arif, Abok, Elissa, Kaka, Etak, Deas, Kak Aulia, Kak Oyol, Kak Juju, Kak Agoy, Kak Fiqhi, Kak Bimo, Kak Ari, Kak Bagus, Kak Tara, Kak Suwar, Kak Della, Kak Canda, Fadil, Regita, Aris, Nayla, Bella, Hansen, Arjun, Wulan, dan lainnya.
15. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan kepada saya agar tetap semangat hingga saat ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untuk saya.

Indralaya, 30 April 2021

Shabiyya Aqila
NIM. 01021181621250

ABSTRAK

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Oleh :

Shabiyah Aqila; Anna Yulianita; Mardalena

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan adalah derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan dari tahun 2013 hingga 2018. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih sangat rendah sekali. Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih belum bisa mandiri dalam menjalankan otonomi daerahnya masing-masing karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, dan juga pemerintah daerah pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian

Ketua

Anggota

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

Mardalena, S.E., M.Si

NIP. 197804212014092004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

Analysis of Regional Financial Independence in the District / City of Jambi Province

By:

Shabiyya Aqila; Anna Yulianita; Mardalena

This study aims to analyze the regional financial independence in the District / City of Jambi Province. The object used in this research is the Regional Revenue and Expenditure Budget in the District / City of Jambi Province. The analytical tools used are the degree of decentralization, dependency ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and independence ratio. This study uses annual secondary data from 2013 to 2018. The results of these studied indicate that the regional financial independence in the District / City of Jambi Province is still very low. Regional governments in each district / city of Jambi Province are still unable to be independent in carrying out their respective regional autonomy because the level of dependence on the central government is still very high, and also local governments in each Regency / City of Jambi Province are still not maximal in increasing Regional Original Revenue his.

Keywords: Local Revenue and Expenditure Budget, Degree of Decentralization, Dependency Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio

Chairman,

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

Member,

Mardalena, S.E., M.Si

NIP. 197804212014092004

Approved by,

Head of Development Economics Program

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Shabiyya Aqila
	NIM	01021181621250
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 14 September 1998
	Alamat	Jalan DI Panjaitan Lr. Samarinda No.191 Rt: 005 Rw: 002 Kelurahan: Sentosa Kecamatan: Seberang Ulu II Kota Palembang Sumatera Selatan
	Nomor Handphone	0895-0858-5805
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi	163	
Berat Badan	55	
Kegemaran	Menari	
Email	shabiyyaa1409@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2003 – 2004	TK Al-Qur'an Iqra' Tuah Sakato Muara Bulian Jambi	
2004 – 2010	SD Negeri 109 Palembang	
2010 – 2013	SMP Negeri 20 Palembang	
2013 – 2016	SMA Negeri 4 Palembang	
2016 – 2021	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	

PENGALAMAN BERORGANISASI	
2016/2017	IMEPA di Universitas Sriwijaya, jabatan : Anggota Mibak (Minat dan Bakat)
2017/2018	UKM Harmoni Universitas Sriwijaya, jabatan : Bendahara I
2016/2021	Anggota UKM Harmoni Universitas Sriwijaya
PENGALAMAN DAN PENGHARGAAN	
2019	Workshop dan Pelatihan Program Kreativitas Mahasiswa
2019	Peserta <i>PUPR Goes To Campus</i> di Universitas Sriwijaya
2019	Pelatihan Peningkatan Kapasitas <i>Soft Skill</i> Calon Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2019	<i>Performer Focus Group Discussion on Program JKN-KIS for Millenial Generation</i>
2019	Pelatihan <i>Soft Skill</i> Mahasiswa dengan tema “ <i>Personal Branding and Effective Communication</i> ”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	20
PENDAHULUAN	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian	27
1.4 Manfaat Penelitian	28
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Keuangan Daerah	10
2.1.1.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah	10
2.1.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
2.1.1.3 Laporan Keuangan Daerah.....	12
2.1.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah	14
2.1.2.1 Derajat Desentralisasi.....	15
2.1.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	16
2.1.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	17
2.1.2.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	18

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah	19
2.1.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Alur Pikir	24
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3 Teknik Analisis	26
3.3.1 Derajat Desentralisasi	26
3.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	27
3.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
3.3.4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	28
3.3.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	29
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jambi	31
4.1.1 Kondisi Geografis	31
4.1.2 Klimatologi	33
4.1.3 Penggunaan Lahan	33
4.1.4 Potensi Wilayah	34
4.1.5 Demografi Penduduk	35
4.2 Hasil Penelitian	35
4.2.1 Derajat Desentralisasi	36
4.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	43
4.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	54
4.2.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	60
4.2.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	67
4.3 Pembahasan.....	78
4.3.1 Derajat Desentralisasi	78

4.3.1.1 Kabupaten Kerinci	79
4.3.1.2 Kabupaten Bungo.....	80
4.3.1.3 Kabupaten Merangin.....	81
4.3.1.4 Kabupaten Sarolangun	81
4.3.1.5 Kabupaten Batanghari.....	82
4.3.1.6 Kabupaten Muaro Jambi	82
4.3.1.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	83
4.3.1.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	84
4.3.1.9 Kabupaten Tebo	84
4.3.1.10 Kota Jambi	85
4.3.1.11 Kota Sungai Penuh.....	86
4.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	87
4.3.2.1 Kabupaten Kerinci	88
4.3.2.2 Kabupaten Bungo.....	89
4.3.2.3 Kabupaten Merangin.....	90
4.3.2.4 Kabupaten Sarolangun	90
4.3.2.5 Kabupaten Batanghari.....	91
4.3.2.6 Kabupaten Muaro Jambi	92
4.3.2.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	92
4.3.2.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	93
4.3.2.9 Kabupaten Tebo	94
4.3.2.10 Kota Jambi	94
4.3.2.11 Kota Sungai Penuh.....	95
4.3.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	96
4.3.3.1 Kabupaten Kerinci	97
4.3.3.2 Kabupaten Bungo.....	98
4.3.3.3 Kabupaten Merangin.....	99

4.3.3.4 Kabupaten Sarolangun	99
4.3.3.5 Kabupaten Batanghari.....	100
4.3.3.6 Kabupaten Muaro Jambi	101
4.3.3.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	101
4.3.3.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	102
4.3.3.9 Kabupaten Tebo	103
4.3.3.10 Kota Jambi	104
4.3.3.11 Kota Sungai Penuh.....	104
4.3.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	106
4.3.4.1 Kabupaten Kerinci	107
4.3.4.2 Kabupaten Bungo.....	108
4.3.4.3 Kabupaten Merangin.....	108
4.3.4.4 Kabupaten Sarolangun	109
4.3.4.5 Kabupaten Batanghari.....	109
4.3.4.6 Kabupaten Muaro Jambi	110
4.3.4.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	111
4.3.4.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	111
4.3.4.9 Kabupaten Tebo	112
4.3.4.10 Kota Jambi	112
4.3.4.11 Kota Sungai Penuh.....	113
4.3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	114
4.3.5.1 Kabupaten Kerinci	115
4.3.5.2 Kabupaten Bungo.....	116
4.3.5.3 Kabupaten Merangin.....	118
4.3.5.4 Kabupaten Sarolangun	119
4.3.5.5 Kabupaten Batanghari.....	120
4.3.5.6 Kabupaten Muaro Jambi	121

4.3.5.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	122
4.3.5.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	123
4.3.5.9 Kabupaten Tebo	125
4.3.5.10 Kota Jambi	126
4.3.5.11 Kota Sungai Penuh.....	127
BAB V	135
PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah)	25
Tabel 2. 1 Kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi	16
Tabel 2. 2 Kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah	17
Tabel 2. 3 Kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah.....	18
Tabel 2. 4 Kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah	18
Tabel 2. 5 Tingkat kemandirian keuangan daerah dan pola hubungan.....	21
Tabel 4. 1 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013-2018	36
Tabel 4. 2 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013-2018	37
Tabel 4. 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013-2018	37
Tabel 4. 4 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013-2018	38
Tabel 4. 5 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2013-2018	39
Tabel 4. 6 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	39
Tabel 4. 7 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013-2018.....	40
Tabel 4. 8 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013-2018	40
Tabel 4. 9 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2018	41
Tabel 4. 10 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	42
Tabel 4. 11 Perhitungan Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013-2018	42

Tabel 4. 12 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013-2018	43
Tabel 4. 13 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013-2018	44
Tabel 4. 14 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013-2018	45
Tabel 4. 15 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013-2018	46
Tabel 4. 16 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2013-2018	47
Tabel 4. 17 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	48
Tabel 4. 18 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013-2018	49
Tabel 4. 19 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013-2018	50
Tabel 4. 20 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2018	51
Tabel 4. 21 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	52
Tabel 4. 22 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013-2018	53
Tabel 4. 23 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013-2018	54
Tabel 4. 24 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013-2018	55
Tabel 4. 25 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013-2018	55
Tabel 4. 26 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013-2018	56
Tabel 4. 27 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2013-2018	57
Tabel 4. 28 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	57

Tabel 4. 29 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013-2018.....	58
Tabel 4. 30 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013-2018	58
Tabel 4. 31 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2018	59
Tabel 4. 32 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	59
Tabel 4. 33 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013-2018	60
Tabel 4. 34 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013-2018	61
Tabel 4. 35 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013-2018	61
Tabel 4. 36 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013-2018	62
Tabel 4. 37 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013-2018	62
Tabel 4. 38Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2013-2018	63
Tabel 4. 39 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	64
Tabel 4. 40 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013-2018	64
Tabel 4. 41 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013-2018	65
Tabel 4. 42 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2018	65
Tabel 4. 43 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	66
Tabel 4. 44 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013-2018	66
Tabel 4. 45 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2013-2018	67

Tabel 4. 46 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013-2018	68
Tabel 4. 47 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013-2018	69
Tabel 4. 48 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013-2018	70
Tabel 4. 49 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2013-2018	71
Tabel 4. 50 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	72
Tabel 4. 51 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013-2018.....	73
Tabel 4. 52 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013-2018	74
Tabel 4. 53 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2018	75
Tabel 4. 54 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Jambi Tahun Anggaran 2013-2018	76
Tabel 4. 55 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013-2018	77
Tabel 4.3. 1 Kriteria Derajat Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018.....	78
Tabel 4.3. 2 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	87
Tabel 4.3. 3 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	96
Tabel 4.3. 4 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	106
Tabel 4.3.5. 1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	114
Tabel 4.3.5. 2 Penyebab Tidak Mandiri dan Kebijakan Untuk Mencapai Kemandirian di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Jambi	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	142
Lampiran 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	143
Lampiran 3 Data Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	144
Lampiran 4 Data Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	145
Lampiran 5 Data Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	146
Lampiran 6 Hasil Derajat Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	147
Lampiran 7 Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	148
Lampiran 8 Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	149
Lampiran 9 Hasil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	150
Lampiran 10 Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perubahan kepemimpinan di Indonesia telah mengubah tata kelola keuangan Indonesia pula, terutama dalam hal anggaran dasar yang dialokasikan ke seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia harus memiliki kemandirian dalam mengelola pendapatan dan belanja daerahnya untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang sering terjadi di Indonesia dan membayar hutang luar negeri. Untuk mengukur kemandirian suatu daerah dapat menggunakan rasio kemandirian yang dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pada tahun 2001 telah menimbulkan dampak dan pengaruh yang signifikan bagi Indonesia. Seiring dengan laju perubahan tersebut, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mengalami perubahan di berbagai bidang khususnya bidang administrasi dan bidang keuangan. Perubahan sistem ini juga dikenal dengan nama otonomi daerah.

Masyarakat menyakini bahwa otonomi daerah ini merupakan jalan alternatif terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sistem pemerintahan ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya yaitu sistem pemerintahan terpusat (sentralisasi) yang banyak dianggap sebagai faktor utama penyebab lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta penyebab semakin besarnya ketimpangan antar pusat dan daerah maupun antar daerah satu dengan daerah lain.

Ada empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Elemen-elemen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang wajib untuk dikelola secara efektif dan efisien sehingga akan tercapai kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam melakukan fungsinya dengan benar dan baik (Sidik, 2001).

Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralisation*) adalah salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan merupakan komponen utama dari otonomi. Jika pemerintah daerah ingin melaksanakan funginya dengan efektif, maka pelaksanaannya akan diwujudkan dengan berbagai sumber keuangan memadai yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta bantuan pemerintah pusat.

Aspek keuangan dapat menjadi suatu indikator yang dapat dimanfaatkan guna mengetahui kesanggupan suatu daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber penerimaan yang dimiliki guna membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangganya sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan.

Kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan ini dapat dilihat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sebuah daerah bisa dibilang mandiri jika PAD dalam APBD mempunyai proporsi yang relatif tinggi dibandingkan total penerimaan. Demikian sebaliknya, jika proporsi pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat lebih besar dibandingkan total penerimaan daerah jadi bisa

disimpulkan bahwa daerah tersebut mempunyai ketergantungan fiskal atau belum mandiri dalam hal finansial (Triastuti, 2005).

Pemerintah daerah berperan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang harus menyerahkan pertanggungjawaban daerah masing-masing agar dapat dinilai dan dilihat apakah Pemerintah Daerah sudah bisa mengurus keuangan daerah dengan benar atau tidak. Untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah bisa dilihat menggunakan analisis rasio.

Untuk melaksanakan pembangunan serta menyediakan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar untuk merancang dan mengaplikasikan Pendapatan Asli Daerah yang didapat untuk melaksanakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah sah lainnya seperti pemasukan yang didapat dari pemanfaatan aset daerah dari pihak bukan Pemerintah Daerah seperti swasta.

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah dengan PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah berguna untuk melihat kemampuan pemerintah daerah agar bisa mandiri untuk membayar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat (Astuti, 2017).

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan. Pengalokasian dana perimbangan digunakan untuk berbelanja namun tidak melihat kemampuan untuk meningkatkan PAD (Astuti, 2017).

Setiap tahun Pemerintah Daerah akan terus meminta bantuan transfer kepada pemerintah pusat dan tidak menjalankan pajak daerah dengan optimal. Jika keadaan tersebut selalu berjalan maka akan terjadi kebergantungan pemerintah daerah secara terus menerus kepada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam membayar belanja daerah. Saat pemerintah daerah merespon belanja daerah yang besar dari dana perimbangan ketimbang PAD maka akan terjadi fenomena *flypaper effect* (Maimunah, 2006).

Flypaper effect atau efek kertas layang adalah keadaan dimana Pemerintah Daerah meminta belanja yang besar dalam menggunakan dana transfer seperti DAU dari pada memakai dana sendiri.

Dalam penelitian ini saya akan menganalisis tentang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada $00^{\circ}45' - 20^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $1010^{\circ}10' - 1040^{\circ}55'$ Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh (Pemerintah Provinsi Jambi, 2018).

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter diatas permukaan laut di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter diatas permukaan laut, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat(Pemerintah Provinsi Jambi, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan), Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi), Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) dan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)(Pemerintah Provinsi Jambi, 2018).

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah)

Akun	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Daerah	12.813,00	13.780,00	14.044,00	15.868,00	17.269,00	17.884,00
Pendapatan Asli Daerah	1.647,00	2.151,00	2.180,00	2.227,00	2.859,00	2.868,00
Pajak Daerah	1.046,00	1.286,00	1.318,00	1.307,00	1.748,00	1.882,00
Retribusi Daerah	132,00	198,00	176,00	182,00	116,00	99,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	70,00	87,00	98,00	88,00	104,00	114,00
Lain-lain PAD yang sah	397,00	578,00	587,00	648,00	890,00	772,00
Dana Perimbangan	9.629,00	9.743,00	9.226,00	11.402,00	12.256,00	12.572,00
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	2.932,00	2.512,00	1.709,00	1.464,00	1.798,00	1.896,00
Dana alokasi umum	6.200,00	6.751,00	6.755,00	8.093,00	7.957,00	7.969,00
Dana alokasi khusus	496,00	479,00	761,00	1.844,00	2.500,00	2.707,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.537,00	1.885,00	2.637,00	2.238,00	2.152,00	2.443,00
Belanja Daerah	13.269,00	13.916,00	14.555,00	15.417,00	16.872,00	17.330,00
Jumlah	50.168,00	53.366,00	54.046,00	60.778,00	66.521,00	68.536,00

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jambi, Tahun 2013 - 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebesar 274.797,00 triliun rupiah yang terdiri dari 91.658,00 triliun rupiah berasal dari Pendapatan Daerah dan sisanya dari Belanja Daerah yaitu sebesar

91.359,00 triliun rupiah. Dana Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 13.932,00 triliun rupiah dan dari dana perimbangan sebesar 64.828,00 triliun rupiah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi berasal dari penerimaan Pajak Daerah sebesar 8.587,00 triliun rupiah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 3.872,00 triliun rupiah, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 561,00 triliun rupiah.

Dalam pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun anggaran 2003-2018, efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi berada dalam interval diatas 100% yang berarti sangat efektif. Banyaknya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai daerah disebabkan oleh banyaknya kontribusi hasil olah dari kekayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan. Mulai dari Rp 1.647.478.849.217 pada tahun 2013 yang meningkat menjadi Rp 2.151.366.749.663 pada tahun 2014, kemudian ditahun 2015 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp 2.180.596.717.824, lalu selanjutnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 2.245.880.381.907 di tahun 2016, dan selanjutnya ditahun 2017 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami kembali peningkatan yaitu menjadi Rp 2.859.652.827.721. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 2.868.763.218.313. Bersamaan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari dana perimbangan mengalami peningkatan dan penurunan. Dari Rp 9.629.205.138.553 pada tahun 2013 lalu meningkat menjadi Rp

9.743.938.192.289 pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 9.226.732.048.234. Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2016 dana perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang drastis yaitu menjadi Rp 11.402.211.626.438. Lalu ditahun 2017 mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi Rp 12.256.803.307.253. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 12.572.414.590.391.

Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Masyarakat harus tetap mendukung apapunkebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus benar-benar ditingkatkan secara optimal sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan dana yang sesuai dengan anggaran dan tingkat kemandirian yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Sriwijaya.
- b. Bagi Pemerintah agar bisa dilihat untuk bahan masukan terhadap pemerintah daerah untuk membuat kebijakan, dan strategi dalam memperbaiki kemandirian keuangan daerah.

Bagi peneliti bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pengukuran kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina, D., Amir, A., & Yudi. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi*.
- Amalia, F. R., & Purbadharma, P. (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.
- Astuti, S. C. (2017). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Bayage, N. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Kabupaten Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013)*.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2013-2018.*
- Dora, J. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*.
- Febriantoko, J. (2017). *Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera*.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*.
- Handoko, T. H., & Rekshohadiprodjo. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012*.
- Mahardika, I. G. N. S., & Artini, L. G. S. (2014). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif*,

DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Dan Politik, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.*

Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.*

Mondes, M. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.*

Pramita, P. R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2014.*

Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.*

Rahmayati, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013.*

Ramadhani, F. R. (2016). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015.*

Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Malinau Tahun 2005-2014.*

Rohim, M. A. (2017). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.*

Saputra, B., Amzar, Y. V., & H.P, P. (2015). *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi.*

Saputra, D. (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat.*

Sholikhah, R. (2011). *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya*

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009.

Sidik, M. (2001). *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal :Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara, Serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah.*

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012).*

Suseno, D. A. (2013). *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal.*

Syukriy, A., & Halim, A. (2006). *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemerintahan Dan Sumber Pendapatan.*

Triastuti, M. R. H., & Darwin, M. (2005). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Yogyakarta (Studi Tentang Desentralisasi dan Otonomi Fiskal Daerah).*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pusat dan Daerah. (1999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika. (2004).

Wulandari, A. (2001). *Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik Vol.5 No.2 November.*

Yuana, A. P. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)*.